



Buletin ISEN MULANG

edisi : 303 / Januari 2020

Buletin Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah



Menag : Penguatan Identitas Keagamaan dan Identitas Kebangsaan Tidak Boleh Dipisahkan **6**



Sugianto : Pembangunan Jalan dan Jembatan Buka Akses dan Keterisolasian Daerah.

Gubernur Sugianto : Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Harus Tepat Waktu **8**



Gubernur Minta Pramuka Dihidupkan Untuk Pembangunan Karakter **18**



**DITERBITKAN BERDASARKAN
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor : 188.44/**

Pelindung :

Gubernur Kalimantan Tengah

Penasehat :

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Pengarah :

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Sekda Prov. Kalteng

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Pemimpin Redaksi:

Kepala Bagian Penyaringan Informasi dan Publikasi pada
Biro Protokol dan Penyaringan Informasi dan Publikasi
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Informasi Pemerintahan dan Umum
pada Biro Protokol dan Penyaringan Informasi dan
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Wakil Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Media dan Dokumentasi pada
Biro Protokol dan Penyaringan Informasi dan Publikasi
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Koordinator Distribusi :

Kepala Sub Bagian Informasi Ekonomi, Pembangunan
dan Kesejahteraan Rakyat Biro Protokol dan
Penyaringan Informasi dan Publikasi Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Redaktur :

Setya SRI Saryanta

Penyedia Bahan :

Rani Diah Anggraini

Staf Redaksi :

Dewi Yulianti, Dina Meitriana, Kamala Sri Y. R.,
Winda Paskanova, Renny Patrisia,
Nova Anggreni, Sophia Fitra Djangan.

Fotografer :

Boy Irawan, Efendy, Eka Supriyaningsih, Joko Prabowo.

Layout :

Benito Zuares

Operator Komputer :

Ahmad Salahudin

Alamat Redaksi :

Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya

Telp/Fax (0536) 4200241

Ijin Penerbitan Khusus

No. 2114/SK/Dirjen PPG/STT/1995

DAFTAR ISI :

Sugianto : Pembangunan Jalan dan Jembatan
Buka Akses dan Keterisolasian Daerah.____3

Wagub Kalteng : ASN Harus Memberikan
Layanan Terbaik Kepada Masyarakat____4

Wagub Kalteng Harapkan Pembahasan Raperda
Lahirkan Terobosan Kreatif.____5

Pemprov Kalteng Terima Dua Raperda Inisiatif
Dewan____6

Menag : Penguatan Identitas Keagamaan
dan Identitas Kebangsaan Tidak Boleh
Dipisahkan.____6

Gubernur Sugianto : Lelang Pengadaan Barang
dan Jasa Harus Tepat Waktu.____8

Serap Aspirasi, Wakil Ketua MPR RI Syarifudin
Hasan Kunjungi Kalteng.____9

Kejaksanaan Tinggi Kalteng Monitor Perda
Penghambat Investasi.____10

Kalteng Waspada Wabah Virus
Korona.____10

Otto Fitriandy Pimpin OJK Kalteng.____11

Kalteng Sumbangkan 25,3 % Produk CPO
Nasional____12

Inflasi Kalteng 2019 Stabil.____13

Gubernur Tanam Padi Varietas Unggul Di
Lembeng Barsel____14

Gubernur Pimpin Hari Bhakti Imigrasi Ke-70
Tingkat Provinsi Kalteng 2020____16

Wagub Kalteng : Perbedaan Bukan Untuk
Diperdebatkan____17

Gubernur Minta Pramuka Dihidupkan Untuk
Pembangunan Karakter____18

Redaksi menerima naskah tulisan dari Dinas, Badan, Instansi, Biro dan Kantor Unit Satuan Kerja baik berupa Artikel, Feature maupun Foto yang menunjang kemajuan Buletin Isen Mulang dan Redaksi berhak mengedit Naskah yang masuk. Kiriman Naskah Tulisan maupun Foto disampaikan ke Sub Bagian Informasi Pemerintahan Umum Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Prov Kalteng Jl. RTA Milono No.1 Palangka Raya, Telp/Fax (0536) 4200241

Website : <http://www.biropkp.kalteng.go.id>

Facebook : <http://www.facebook.com/SetdaProvKalteng/>

Twitter : http://www.twitter.com/setda_kalteng

Instagram : [@sekretariat.daerah.kalteng](https://www.instagram.com/sekretariat.daerah.kalteng)

email : buletin.isenmulang@gmail.com



Sugianto : Pembangunan Jalan dan Jembatan Buka Akses dan Keterisolasian Daerah.

Palangka Raya. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran secara kontinyu melakukan pemantauan terhadap proses pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah untuk memastikan pembangunan infrastruktur tersebut berjalan lancar dan sesuai target yang telah ditentukan.

Salah satu lokasi proyek pembangunan infrastruktur yang dipantau Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran adalah pembangunan ruas jalan dan jembatan Tumbang Samba di Kabupaten Katingan. Pembangunan jembatan Tumbang Samba melalui dana APBN Kementerian PUPR RI ini dinilai strategis karena menghubungkan wilayah Kalimantan Tengah menuju Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. "Kita bangga dan berterima kasih kepada pemerintah pusat, pak Presiden dan Kementerian PUPR yang sudah membangun jembatan Tumbang Samba. Jalan dan jembatan ini dapat menghubungkan wilayah Kalbar, Kaltim dan Kalteng sehingga dapat membuka daerah yang terisolasi khususnya di wilayah Katingan Provinsi Kalteng", beber Sugianto Sabran dalam kunjungannya yang didampingi Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, Bupati Katingan Sakariyas, Anggota DPRD Kalteng Sengkon beserta sejumlah Pimpinan OPD Provinsi Kalteng di Tumbang Samba Katingan, Sabtu (18/01/20).

Gubernur Sugianto juga mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Katingan yang dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dalam membangun jalan desa untuk warga masyarakat. "Langkah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten Katingan yang dapat berkolaborasi membangun akses jalan tembus ke desa Tumbang Samba sudah bagus sehingga nantinya jalan tersebut dapat ditingkatkan kualitasnya", ujarnya.

Sugianto Sabran juga menjelaskan pihaknya telah menyampaikan surat permohonan kepada Presiden RI untuk meresmikan pemanfaatan Jembatan Tumbang Samba pada Maret mendatang. Sugianto mengatakan dalam kurun waktu lima tahun pemerintahannya fokus membangun Infrastruktur, SDM, Kesehatan dan Perekonomian termasuk pembangunan jalan dan jembatan yang bertujuan untuk membuka akses dan keterisolasian daerah.

Sementara itu Bupati Katingan Sakariyas menyambut baik kehadiran Gubernur Kalimantan Tengah ke wilayah Kabupaten Katingan sehingga pihaknya dapat menyampaikan aspirasi dan keinginan masyarakat setempat dalam melaksanakan dan menyukseskan pembangunan di Kabupaten Katingan. "Kami juga ingin membangun jembatan menggunakan dana APBD Katingan dan diharapkan nantinya dapat dibantu melalui APBD Provinsi," kata Sakariyas.

Hal senada disampaikan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari Dapil Kabupaten Katingan Sengkon yang mengharapkan pemerintah provinsi dapat membantu anggaran pembangunan untuk wilayah Katingan. "Tentu kami bersama pak Gubernur melihat lebih jauh kondisi masyarakat dan daerah Kabupaten Katingan, di mana berbagai hal termasuk program kerakyatan dapat dilakukan di sini oleh Pemprov Kalteng," jelasnya.

Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian PUPR Ferry Margo Santosa yang turut mendampingi Gubernur dalam peninjauan pembangunan jembatan Tumbang Samba menjelaskan, pembangunan jembatan sepanjang 834 meter yang dimulai sejak tahun 2016 dan dijadwalkan rampung Maret 2020 itu menghabiskan dana Rp.298 miliar,- dari APBN Kementerian PUPR RI. Menurut Ferry, tahun 2024 pihaknya mengalokasikan dana untuk perbaikan dan peningkatan kualitas jalan tembus dari Kabupaten Katingan menuju wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.

Selain memonitor pembangunan jembatan Tumbang Samba, Sugianto Sabran dan rombongan juga mengunjungi sentra pembuatan kain khas Kalimantan Tengah serta menyerahkan bantuan untuk pemberdayaan warga lokal dan komunitas adat terpencil di Desa Tumbang Sanaman Kecamatan Katingan Hulu, sekaligus berinteraksi serta menyerap dan menampung aspirasi masyarakat setempat.***

Wagub Kalteng : ASN Harus Memberikan Layanan Terbaik Kepada Masyarakat



PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Ribuan Aparatur Sipil Negara, Tenaga Kontrak dan Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menghadiri Apel Besar di halaman Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (02/01/2020).

Apel Besar ini menandai dimulainya aktifitas kerja Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak di lingkup pemerintah provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 setelah menjalani libur Natal 25 Desember 2019 dan Tahun Baru 2020.

Apel Besar tersebut diawali dengan serah terima jabatan Pejabat Tinggi Pratama di lingkup pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dan dilanjutkan dengan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2020 kepada Pimpinan OPD lingkup pemerintah provinsi Kalimantan Tengah.

DPA Tahun Anggaran 2020 dengan total Rp. 5.399.361.541.478,60,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 2.922.473.909.232,75,- dan Belanja Langsung Rp 2.476.887.605.245,85,. DPA terbesar diterima Dinas Pendidikan dan PUPR Kalimantan Tengah masing-masing di atas Rp.1 triliun.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya saat memimpin Apel Besar ASN tersebut mengharapkan kualitas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD maupun APBN harus ditingkatkan menjadi lebih baik dari tahun 2019. Karena itu diminta kepada para Pejabat Tinggi Pratama yang dilantik akhir Desember 2019 sebagai Pimpinan OPD agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di tempat kerja yang baru. “Semoga Saudara dapat mengemban tugas dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab. Tunjukkan dedikasi, loyalitas dan kinerja yang tinggi serta segera menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di tempat kerja yang baru”, tegas Wagub.

Demikian juga kepada seluruh Aparatur Sipil Negara juga diminta meningkatkan disiplin dan tanggungjawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan terbaik serta mampu menunjukkan prestasi yang cemerlang, dedikasi yang tinggi, loyalitas yang teruji dan tak tercela. “Saya sangat yakin dan

percaya apabila seluruh ASN Amanah, maka Kalimantan Tengah akan Berkah”, kata Habib Yahya Bin Ismail.

Wagub juga mengharapkan seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar terus meningkatkan dan menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban serta keamanan di kantor masing-masing.

Sehubungan dengan Pilkada serentak September 2020 dan di Kalimantan Tengah dilaksanakan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur serta Bupati/Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Wagub Kalteng Habib Ismail Bin Yahya mengharapkan semua pihak terkait agar terus aktif melakukan pendekatan dan sosialisasi dalam upaya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pilkada dimaksud sehingga partisipasi masyarakat dalam menggunakan hal pilihnya semakin meningkat dalam pesta demokrasi tersebut.

Habib Ismail juga menghimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah provinsi Kalimantan Tengah agar menjaga netralitasnya dengan tetap berkonsentrasi terhadap pelaksanaan tugas sebagai aparatur negara sesuai tugas dan fungsinya secara profesional. “Hindari tindakan-tindakan atau isu-isu yang tidak bertanggungjawab, fitnah, gesekan antar kelompok masyarakat dan adu domba yang bernuansa politis maupun yang bersinggungan dengan suku, agama, ras dan antar golongan”, tegas Habib.***



Wagub Kalteng Harapkan Pembahasan Raperda Lahirkan Terobosan Kreatif.

PALANGKARAYA – Biro PKP. DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam memasuki tahun 2020 mengawali kegiatan Dewan dengan menggelar Rapat Paripurna Ke - 1 Masa Persidangan - 1 Tahun 2020 yang dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Unsur Forkopimda, Sekda Kalteng, Pimpinan Instansi Vertikal dan OPD Provinsi Kalimantan Tengah, Pimpinan BUMN/ BUMD, Perbankan, Akademisi, tokoh pemuda dan masyarakat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng, Rabu (15/01/20).

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Wiyatno mengungkapkan beberapa hal yang patut dicermati dalam merumuskan kebijakan strategis daerah tahun 2020 antara lain Pilkada serentak 2020 termasuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Wakil Bupati Kotawaringin Timur tanggal 23 September 2020. “Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah ini disamping menyerap anggaran daerah, juga akan meningkatkan eskalasi kontestasi yang bisa saja menciptakan ketegangan di masyarakat,” jelasnya.

Demikian juga pada tataran regional dengan penetapan Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah Ibukota Negara sehingga menempatkan Kalimantan Tengah sebagai Wilayah Penyangga Utama, khususnya di empat Kabupaten Daerah Aliran Sungai Barito. “Ini bisa menjadi peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan dan menciptakan usaha baru manakala kita mampu memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut secara baik,” imbuh Wiyatno.

Selanjutnya pada tataran nasional kata Wiyatno, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi stagnan akibat kelesuan ekonomi global dan gelombang ketidakpastian. Kondisi tersebut penting untuk diwaspadai karena hantaman terhadap ekonomi nasional akan berdampak kepada struktur anggaran dan

kelesuan perekonomian di daerah.

Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya pada Rapat Paripurna Dewan tersebut menjelaskan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan belum semuanya memenuhi seluruh harapan, aspirasi dan tuntutan dari berbagai pihak. Hal itu disebabkan keterbatasan dalam menampung serta merealisasikan aspirasi dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. “Namun kita yakin dan percaya bilaman semua pihak dapat bekerjasama dengan baik dan kompak, niscaya apa yang menjadi cita-cita kita bersama akan dapat terwujud” kata Habib Ismail.

Habib Ismail Bin Yahya juga mengemukakan beberapa materi pokok yang akan dibahas pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020.

Sejumlah materi pokok yang akan dibahas itu meliputi Rancangan Peraturan Daerah tentang Kebakaran Hutan, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Raperda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah, Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah dan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Wagub Habib Ismail Bin Yahya berharap pembahasan Raperda antara Legislatif dan Eksekutif pada Masa Persidangan I tahun Sidang 2020 dapat melahirkan terobosan-terobosan baru yang kreatif. “Saya berharap, selain dapat merampungkan berbagai materi persidangan yang telah ditetapkan dan dijadwalkan, kita mampu menciptakan terobosan-terobosan dan pemikiran-pemikiran baru yang lebih kreatif, sehingga mampu menghadapi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat menuju Kalimantan Tengah yang lebih baik,” paparnya.***

Pemprov Kalteng Terima Dua Raperda Inisiatif Dewan

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan menerima Dua Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. “Berdasarkan pandangan dan pendapat kami, maka dengan demikian kami menyatakan menerima Dua Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, masing-masing yaitu Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,” kata Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya pada Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020, Senin (27/01/2020) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng.

Habib Ismail juga menyampaikan saran dan masukan apabila dalam Raperda tentang Pembentukan Perda Provinsi Kalteng yang diajukan DPRD dan Gubernur berisi muatan materi yang sama, maka sebaiknya masuk dalam kebijakan tata cara pembentukan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) sehingga tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan dalam

penyusunan Raperda.

Disebutkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan Perda antara lain mengenai tanggung jawab dan wewenang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang perlunya dipertegas antara kewenangan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Berkaitan dengan pendanaan penanggulangan bencana untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana memerlukan alokasi anggaran yang harus memadai terutama mengenai dana kontijensi, dana siap pakai serta dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi yang dialokasikan.

Menyusul diterimanya Dua Raperda tersebut oleh Pemprov Kalteng maka akan dilakukan pembahasan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Kalteng.

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalteng H. Abdul Razak tersebut diikuti Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.***

Menag : Penguatan Identitas Keagamaan dan Identitas Kebangsaan Tidak Boleh Dipisahkan.

PALANGKA RAYA – Biro PKP. Menteri Agama RI Fahrul Razi menegaskan di dalam Negara Pancasila, siapapun dengan alasan apapun tidak diperkenankan melakukan propaganda anti-agama, penistaan terhadap ajaran agama dan simbol-simbol keagamaan, menyiarkan agama dengan pemaksaan serta ujaran kebencian dan kekerasan terhadap pemeluk agama yang berbeda. Demikian pula segala kebijakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan kaidah agama dan ideologi negara.

Menteri Agama RI Fachrul Razi mengemukakan hal tersebut dalam sambutannya disampaikan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri pada Peringatan Hari Amal Bhakti Ke-74 Kementerian Agama RI 2020 di Stadion Sanaman Mantikei Palangka Raya, Jumat (03/01/2020).

Kementerian Agama dibentuk pada 3 Januari 1946 di tengah kancah revolusi fisik bangsa Indonesia dalam mempertahankan Kemerdekaan dari penjajahan. Karena itu Peringatan Hari Amal



Bakti Kementerian Agama merupakan tonggak peristiwa penting yang mempunyai arti khusus bagi bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kaidah dan nilai-nilai kehidupan beragama. “Kementerian Agama hadir dalam rangka pelaksanaan Pasal 29

Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu,” papar Menteri Agama.

Fahrul Rasi mengatakan para pendiri Negara Indonesia memperkenalkan “teori akomodasi” yang menyangkut hubungan agama dan negara. Teori ini melengkapi teori yang sudah ada yakni “teori integrasi” atau penyatuan agama dengan negara dan “teori sekularisasi” atau pemisahan agama dengan negara. “Saya perlu menegaskan di sini bahwa penguatan identitas keagamaan dan penguatan identitas kebangsaan tidak boleh dipisahkan, apalagi dipertentangkan, tetapi harus dalam “satu kotak” untuk melahirkan moderasi beragama dan bernegara,” tegasnya.

Menteri Agama juga mengingatkan bahwa penguatan identitas keagamaan bila dipisahkan dari spirit bernegara dapat melahirkan radikalisme beragama. Sebaliknya, penguatan identitas bernegara bila dipisahkan dari spirit beragama dapat memberi peluang berkembangnya sekularisme dan liberalisme.

Untuk itu Farul Razi mengajak jajaran Kementerian Agama di seluruh Indonesia agar terus memahami sejarah, regulasi, tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam konteks relasi agama dan negara, menjaga idealisme, kejujuran, integritas dan budaya kerja serta selalu menanamkan bahwa bekerja itu adalah ibadah dan melayani masyarakat adalah sebuah kemuliaan. Selain itu juga terus memperkuat ekosistem pembangunan bidang agama, antar sektor dan pemangku kepentingan, merangkul semua golongan dan potensi umat dalam semangat kebersamaan, kerukunan, persatuan, moderasi beragama sejalan dengan falsafah Pancasila serta mengimplementasikan Visi dan Misi Pemerintah kedalam Program Kerja Kementerian.

Menteri Agama mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama di Pusat dan di Daerah agar menjadi agen perubahan dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Tanah Air dengan menyelenggarakan dua fungsi strategis yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan sehingga sejalan dengan tema Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama tahun 2020 yakni “Umat Rukun, Indonesia Maju”.

Sekda Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri se usai memimpin Upacara Peringatan Hari Amal Bahkti Kemenag RI 2020 mengharapkan peran Kementerian Agama ke depan semakin maju dalam membangun jiwa dan kerukunan umat. “Ini merupakan pondasi awal di mana setiap individu, setiap warga masyarakat dan setiap

warga negara Indonesia berhak memilih agamanya dan menjalankan pilihannya. Kami bersama Kementerian Agama yang ada di Kalimantan Tengah siap menjaga karena dengan keberagaman terbentuk kedamaian. Dengan adanya kedamaian maka kerukunan terjalin dan pembangunan lebih maju lagi. Kami tidak ingin Kalimantan Tengah terpecah-belah berkenaan dengan hal-hal yang berbau keagamaan, radikalisme apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi Pilkada 2020,” papar Sekda.

Dijelaskan, Kalimantan Tengah termasuk yang terbaik berdasarkan Indeks Kebhinekaan atau Indeks Keberagaman. “Kita harap dengan adanya Indeks Keragaman maka Indeks Demokrasi Indonesia juga cukup baik sehingga ini harus bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Kita berharap dengan adanya kerukunan dan kedamaian maka investasi akan berkembang karena itu bagian dari indikator di saat orang akan berinvestasi,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah H. Masrawan menegaskan pihaknya bertekad akan memajukan dan melaksanakan moderasi beragama dan menekan radikalisme. “Dengan menyampaikan moderasi beragama dan tidak radikal ini, maka saya harapkan umat beragama di Kalimantan Tengah tetap terjaga rukun, damai dan harmonis,” ucapnya.

Hal senada juga dikemukakan Wakil Walikota Palangka Raya Hj. Umi Mastikah serya memastikan Visi dan Misi Walikota Palangka Raya menuju Kota Palangka Raya yang maju, rukun dan sejahtera untuk semua sudah sesuai harapan Kementerian Agama menjadi umat yang rukun menuju Indonesia maju. “Tentu saja saling menjaga sinergitas antara pemerintah dengan Kementerian Agama dan Forkompimda sebagai partner dalam membina masyarakat dan menghadapi situasi apapun termasuk Pilkada dan hal-hal lain”, jelas Umi Mastikah.

Kota Palangka Raya dari tahun ke tahun semakin bagus sebagai miniatur Bhineka Tunggal Ika. “Jadi tidak bisa dipertanyakan lagi atau diragukan lagi bahwa Kota Palangka Raya adalah miniatur kerukunan itu sendiri,” pungkasnya.

Pada Peringatan HAB ke-74 Kementerian Agama Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 tersebut dilakukan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada PNS Kementerian Agama yang telah mengabdikan dirinya selama 30 tahun 6 orang, 20 tahun 21 orang dan PNS yang telah mengabdikan selama 10 tahun sebanyak 46 orang yang dilanjutkan dengan penyerahan Piagam Penghargaan Kakanwil Award kepada 33 Pegawai berprestasi di lingkungan Kementerian Agama Kalimantan Tengah.***

Gubernur Sugianto : Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Harus Tepat Waktu.



PALANGKA RAYA – Biro PKP. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran meminta Bupati dan Walikota serta Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar menghindari permasalahan yang dapat mengakibatkan lelang gagal atau batal. Demikian juga Pengadaan Barang dan Jasa harus dilakukan tepat waktu. “Keterlambatan Pengadaan Barang dan Jasa dapat mempengaruhi dinamikan perekonomian di daerah”, jelas Sugianto Sabran ketika memimpin Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) serta Kick Off Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa secara serentak se-Kalteng melalui Video Conference di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (16/01/20).

Seluruh Perangkat Daerah diimbau agar Penandatanganan Kontrak untuk Tahun Anggaran 2020 selambat-lambatnya dilakukan per 1 Mei 2020. “Ini sesuai amanat Presiden pada Rakornas tanggal 6 November 2019,” tegas Gubernur.

Gubernur Sugianto mengharapkan Rapat TEPRA ini mampu mengidentifikasi permasalahan anggaran tahun lalu dan tidak terulang kembali tahun 2020 sehingga Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. “Banyak hal yang dapat dipetik, dilalui dan dikerjakan pada tahun 2019. Semoga dengan pengalaman tahun lalu, kita bisa bekerja lebih baik, lebih giat dan lebih semangat lagi,” ucapnya.

Disebutkan ada tiga Kabupaten di Kalimantan Tengah yang realisasi penyerapan anggarannya tertinggi yaitu Kabupaten Gunung Mas dengan realisasi keuangan 94,28 % dan fisik 97,80 %, Kabupaten Pulang Pisau 94,18 % keuangan dan fisik

99,16% serta Kabupaten Murung Raya 93,80 % realisasi keuangan dan fisik 94,83 %.

Bersamaan dengan Rapat TEPRA dan Kick Off Penandatanganan Pengadaan Barang dan Jasa secara serentak se-Kalteng itu juga dilakukan Penguatan Forum Pengurangan Risiko Bencana Banjir, Puting Beliung dan Tanah Longsor (FPRB Batingsor) dan Karhutla oleh Gubernur Kalimantan Tengah serta Penandatanganan MoU tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah.

Penandatanganan MoU Penanggulangan Bencana tersebut sebagai wujud peran serta menekan, mengurangi dan menghilangkan risiko bencana di Bumi Tambun Bungai. “Upaya Penanggulangan Bencana adalah urusan bersama”, tegas Sugianto.

Gubernur Sugianto dalam Konferensi Pers sesuai memimpin Rapat TEPRA menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan penanggulangan bencana termasuk pendanaan. Pemerintah Provinsi Kalteng menganggarkan dana Rp. 20 Miliar,- untuk penanganan masalah Karhutla. “Pemerintah Provinsi akan fokus pada pencegahan. 2 sampai 3 bulan sebelum masuk kemarau panjang atau kemarau kering akan melakukan sosialisasi yang melibatkan Kepala Desa, Kepala RT, Tokoh Adat, Damang, Mantir, Masyarakat Peduli Api, TNI dan Polri,” jelas Gubernur.

Untuk itu diharapkan Kabupaten yang rentan terdampak bencana kebakaran setiap tahun agar tidak bergantung dengan dana pusat atau provinsi. Beberapa daerah yang rawan bencana kebakaran tersebut dapat menganggarkan maksimal Rp 5 miliar,- dana tidak terduga pada APBD masing-masing.

Rapat TEPRA dan Kick Off Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa 2020 itu dihadiri Forkopimda, Bupati dan Walikota se-Kalimantan Tengah, Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Kalimantan Tengah serta para Rekanan.***



Serap Aspirasi, Wakil Ketua MPR RI Syarifudin Hasan Kunjungi Kalteng.

Palangka Raya – Biro PKP. Wacana menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terus bergulir dengan harapan mendapat dukungan masyarakat termasuk dukungan dari pemerintah daerah.

Wakil Ketua MPR RI Syarifudin Hasan mengatakan pihaknya terus menjaring masukan dan saran dari pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka menyerap aspirasi terhadap wacana amandemen UUD 1945 tersebut. “Di sini pesertanya cukup banyak dan antusias dibanding daerah lain”, katanya dalam pertemuan dengan jajaran pemerintah provinsi Kalimantan Tengah di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (28/01/2020).

Syarif Hasan menilai ada beberapa pandangan kritis yang disampaikan para peserta dalam pembahasan wacana amandemen UUD 1945 tersebut yang tepat mengena pada substansi persoalan. “Misalnya saja, ada yang memberikan pendapat tidak perlu amandemen, tapi cukup membuat Undang-Undang tersendiri berkenaan dengan GBHN”, jelas Syarif Hasan.

Menurut Syarif Hasan, pihaknya banyak mendengarkan dan mencatat beragam pendapat

dan masukan yang nantinya dibawa ke tingkat pusat untuk mendukung wacana amandemen UUD 1945 tersebut.

Sementara itu Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya ketika memimpin pembahasan wacana amandemen UUD 1945 yang dihadiri Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan tersebut mengatakan wacana amandemen UUD 1945 itu harus disikapi dengan arif dan bijaksana.

Keberadaan GBHN dilihat dari sisi ketatanegaraan dinilai penting agar pembangunan nasional lebih terarah dan komprehensif. “Hingga kinipun sistem pembangunan nasional masih banyak belum terintegrasi dari pusat sampai ke daerah”, ucap Habib Ismail seraya mengatakan hal itu terjadi pasca ketiadaan GBHN dan arah pembangunan selama ini dilaksanakan berdasarkan Visi dan Misi Pimpinan.

Wagub Kalteng mengharapkan diskusi dan pertemuan jajaran pemerintah daerah Kalimantan Tengah beserta sejumlah perwakilan dari berbagai profesi dengan Ketua MPR RI Syarif Hasan tersebut dapat memberikan masukan kepada MPR RI sekaligus pula sebagai kontribusi Kalimantan Tengah terhadap wacana amandemen UUD 1945.

Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan didampingi Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya dan sejumlah Pimpinan OPD se usai pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, melakukan penanaman tiga pohon ulin atau kayu besi di halaman depan Kantor Gubernur Kalteng.***

Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail bin Yahya menerima pelakat dari Wakil Ketua MPR RI Syarifudin Hasan usai melakukan diskusi dan pertemuan dengan rombongan MPR RI di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng,



Kejaksaan Tinggi Kalteng Monitor Perda Penghambat Investasi.

Palangka Raya – Biro PKP. Kejaksaan Agung RI telah menginstruksikan kepada Kejaksaan Tinggi se-Indonesia untuk memonitor keberadaan Peraturan Daerah, terutama terhadap regulasi yang berpotensi menghambat investasi di daerah.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng Mukri menegaskan pihaknya akan menertibkan permasalahan yang bisa menghambat pelaksanaan investasi di wilayah Kalimantan Tengah. Dijelaskan ada beberapa kebijakan yang memang bersumber dari pemerintah yang sangat perlu dan penting untuk diamankan. “Itu yang menjadi salah satu perhatian kami nanti” katanya kepada sejumlah awak media sesuai menghadiri Rapat Peripurna DPRD Kalteng, Rabu (15/01/20).

Menurut Mukri, pihaknya akan melihat dan memetakan hal-hal yang dapat menghambat jalannya investasi di Kalteng dari segi aksi maupun regulasi yang ada. “Terlepas dari apapun itu bentuknya, jika hal itu menghambat investasi, maka kami akan melakukan koordinasi untuk mengambil

langkah penertiban yang perlu dilakukan”, tegasnya.

Dijelaskan, pihaknya juga akan memperhatikan kearifan lokal dalam mengambil langkah penertiban, mengingat situasi dan kondisi suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Hal itu yang mulai dibangun pihak Kejaksaan dengan menjalin komunikasi dan koordinasi bersama pihak terkait lainnya seperti Polda dan Pemprov Kalteng. “Kami tidak mendapatkan target apapun dari pimpinan. Yang pasti, kami akan mengupayakan penegakkan hukum dan pencerahan hukum melalui tindakan represif dan preventif”, terangnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang baru dilantik tersebut menegaskan bahwa semua permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum tetap akan menjadi perhatian pihak Kejaksaan sesuai ketentuan hukum dan aturan yang berlaku.***

Kalteng Waspadai Wabah Virus Korona.

Palangka Raya – Biro PKP. Dewasa ini dunia dihebohkan dengan wabah virus korona yang pertama kali ditemukan menyerang warga di Kota Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok.

Virus korona yang bersumber dari binatang seperti kelelawar dan ular tersebut mulai menyebar ke berbagai negara di Asia. Beberapa negara di belahan duniapun termasuk Indonesia melakukan berbagai upaya antisipasi supaya virus tersebut tidak menyebar dan meluas.

Di Indonesia tercatat 19 pintu masuk pendatang dari Tiongkok termasuk Kalimantan Tengah yang harus waspada dan memperketat pengawasan di Bandara dan di pelabuhan laut mengingat salah satu pelabuhan laut di Kalimantan Tengah memiliki akses langsung ke Tiongkok.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Palangka Raya telah memasang alat deteksi thermal scanner di pintu kedatangan Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya untuk mendeteksi suhu tubuh manusia.

Kepala KKP Kelas III Palangka Raya Solihin menjelaskan petugas KKP Palangka Raya bersama instansi terkait terus memperketat pengawasan agar penumpang yang datang dan memasuki Palangka Raya harus melalui pemeriksaan yang lebih ketat. “Apabila ada yang mengindap demam atau gejala lainnya akan ditanya perjalanannya dari mana, sehingga masyarakat yang terpapar virus korona bisa kita deteksi lebih lanjut”, jelas Solihin.

Sementara di Sampit juga dilakukan pengawasan ketat di pelabuhan laut dan udara. Kepala Kesehatan Pelabuhan (KKP) Sampit Agus Yordani mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan Sampit menjadi daerah rawan penyebaran virus korona karena adanya kapal Tiongkok yang mengangkut hasil tambang melalui Pelabuhan Sampit.

Menurut Agus Yordani, jalur laut memang berpotensi dan rawan sebab kapal Tiongkok langsung ke pelabuhan Sampit. “Tapi pihak pelabuhan tidak membolehkan ABK turun langsung ke daratan. Mereka hanya berada di kapal untuk menjaga hal-hal negatif berkaitan dengan virus korona”, katanya.

Selain di pelabuhan Sampit, pengawasan terhadap kedatangan penumpang di pelabuhan Panglima Utar dan Bandara Iskandar Pangkalan Bun juga diperketat terutama terhadap kedatangan warga negara asing.***



foto : ist



Otto Fitriandy Pimpin OJK Kalteng.

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Pemerintah telah berkomitmen membangun Indonesia dari daerah tertinggal, terdepan dan terluar. “Di sinilah peran penting OJK akan diuji. OJK harus mampu menyediakan kerangka pengatur dan pengawasan sektor jasa keuangan yang mendukung terwujudnya pembiayaan pembangunan daerah” jelas Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara ketika melantik Otto Fitriandy sebagai Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah yang baru menggantikan Iwan Tri Handoyo di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Senin (20/01/20).

Untuk itu Tirta Segara mengharapkan Kantor OJK di daerah agar berperan aktif mendukung program pembangunan di daerah masing-masing mengingat Kantor OJK di daerah merupakan ujung tombak OJK untuk mengeksekusi program dan kebijakan strategis OJK.

Tirta Segara juga mengapresiasi keberadaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Provinsi Kalimantan Tengah yang salah satu programnya adalah Business Matching di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kotawaringin Barat. “Kami berharap forum TPKAD terus diintensifkan sehingga memberikan bukti nyata yang dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan RI Tirta Segara juga mengungkapkan dewasa ini semakin marak investasi bodong berkedok iming-iming bonus yang fantastis. Satgas Waspada Investasi selama tahun 2019 telah menutup 444 entitas investasi ilegal, 68 entitas gadai ilegal dan 1.494 entitas fintech peer-to-peer lending ilegal.

Untuk itu Ia menghimbau warga masyarakat

agar tidak tergiur dengan return (Keuntungan) yang tinggi dan harus hati-hati karena keuntungan yang ditawarkan itu tidak masuk akal. “Masyarakat juga harus waspada terhadap merebaknya Lembaga Pinjaman Online (Fintech). Untuk itu masyarakat diminta cross check terlebih dulu ke OJK, apakah lembaga tersebut resmi atau tidak melalui call center 157 atau melalui Nomor Whatsapp 081157157157”, jelas Tirta Segara.

Dijelaskan, di tengah penurunan pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 ternyata pertumbuhan ekonomi nasional kuartal III 2019 masih tercatat 5,02 % dan diharapkan masih di atas 5 % pada akhir tahun 2019. Kalimantan Tengah juga mencatat pertumbuhan ekonomi 5,31 % pada triwulan III 2019, lebih tinggi dari nasional walaupun melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan II 2019 sebesar 7,67 %. Namun kredit perbankan di Kalteng mampu tumbuh di atas angka nasional yaitu 15 % sampai dengan November 2019.

Pelantikan dan serah terima Kepala OJK Kalteng itu dihadiri Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, Kepala OJK Region IX Kalimantan Riza Aulia Ibrahim, Wakil Ketua DPRD Kalteng Abdul Razak, Anggota Forkopimda Kalteng, Sekda Kalteng Fahrizal Fitri, Pimpinan Lembaga Perbankan dan Kepala OPD se-Kalteng.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengapresiasi kinerja OJK selaku regulator Jasa Keuangan yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. “Penting bagi kami keberadaan BUMD seperti Bank Kalteng itu dibantu pengawasannya oleh OJK. Harapan kami ke depan jika ada masalah yang mengganjal di Bank Kalteng harus ditangani serius dan tuntas,” tegas Sugianto seraya meminta hubungan OJK dan UMKM harus dibina agar perekonomian akar rumput terus berkembang.***



Kalteng Sumbangkan 25,3 % Produk CPO Nasional

Palangka Raya – Biro PKP. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia dan memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan nasional dan daerah melalui pengelolaan komoditas kelapa sawit.

Berdasarkan Angka Tetap Statistik Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 tercatat luas areal perkebunan di Kalimantan Tengah mencapai 2.005.711 hektare (Ha) meliputi areal perkebunan kepala sawit mencapai 1.520.937 Ha yang terdiri atas Perkebunan Rakyat 166.926 Ha dan Perkebunan Besar Swasta 1.354.011 Ha. Produksi Perkebunan Kelapa Sawit mencapai 5.158.524 ton yang terdiri atas produksi Perkebunan Rakyat 277.701 ton dan produksi Perkebunan Besar Swasta 4.880.823 Ton.

Selain itu Kalimantan Tengah juga mampu memproduksi 8.806.401 ton CPO / tahun sehingga provinsi Kalimantan Tengah berkontribusi terhadap Produksi CPO Nasional sebesar 25,3 %. Produksi CPO Nasional berdasarkan data Gapki pada Agustus 2019 sebesar

34.700.000 ton / tahun.

Namun perkebunan sawit di Kalimantan Tengah juga perlu peremajaan. Realisasi Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kalimantan Tengah hingga November 2019 mencapai Rp 120.475.000.000,- sedangkan usulan kontribusi dana sawit untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencapai Rp 6,16 Triliun lebih yang digunakan untuk memenuhi kewajiban menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar dan Kewajiban lainnya. Sementara itu Dana Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) digunakan untuk pengembangan SDM perkebunan sawit, penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, promosi perkebunan kelapa sawit, peremajaan perkebunan kelapa sawit serta sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit.

Di sisi lain, Realisasi penerimaan DBH Bukan Pajak dari Sektor Kehutanan (IUHPH, PSDH dan DR) untuk tahun 2019 mencapai Rp 25.122.695.400,- dan dari Sektor Pertambangan (landrent, eksplorasi dan

eksploitasi, minyak bumi dan gas bumi) mencapai nilai Rp.153.049.571.974,-.

Seiring dengan perkembangan waktu dan tuntutan kebutuhan pembangunan daerah, ternyata beberapa Gubernur Kepala Daerah yang daerahnya sebagai provinsi penghasil kelapa sawit merasa perlu melakukan perbaikan regulasi dan pembagian dana bagi hasil kelapa sawit bagi provinsi penghasil kelapa sawit. Hal itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama tentang Usulan Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit bagi Provinsi Penghasil Kelapa Sawit yang ditandatangani 21 Kepala Daerah Provinsi se Indonesia pada Rapat Koordinasi tentang DBH Kelapa Sawit bagi Provinsi Penghasil Kelapa Sawit di Hotel Grand Central Pekanbaru Riau, Sabtu (11/01/2020).

Ke-21 provinsi yang menandatangani Surat Keputusan Bersama tentang Usulan Pembagian Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit bagi Provinsi Penghasil Kelapa Sawit tersebut terdiri Provinsi Riau, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Papua Barat, Papua dan provinsi Kalimantan Tengah yang dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya.

Rapat Koordinasi yang dibuka Gubernur Riau Syamsuar tersebut menghasilkan 10 butir usulan yang dituangkan ke dalam Keputusan Bersama terkait dengan Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit bagi Provinsi Penghasil Kelapa Sawit antara lain :

Pertama, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan memasukkan DBH Pungutan

Ekspor dan Bea Keluar dari hasil perkebunan serta peningkatan bagi hasil dari PPH orang pribadi yang dilakukan secara terbatas melalui peningkatan rasio bagi hasil PPH khusus dari perkebunan kelapa sawit kepada daerah.

Kedua, mengusulkan revisi PP Nomor : 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan Perpres Nomor : 61 Tahun 2015 Jo. Perpres Nomor : 66 Tahun 2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit beserta perubahan-perubahannya dan turunannya, tidak hanya mengatur komoditas kelapa sawit namun mengatur seluruh komoditas perkebunan strategis seperti diamatkan dalam PP Nomor : 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan bahwa penggunaan dari penghimpunan dana perkebunan kepala sawit dapat dibagikan kepada daerah penghasil.

Ketiga, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor:

28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 tanggal 20 April 2017 yang memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2009 khususnya berkenaan dengan pengenaan pajak terhadap alat berat karena terdapat hubungan yang erat antara pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Keempat, mengusulkan

revisi aturan Kementerian Perdagangan yang terkait penurunan/penghilangan batas threshold terkait pengenaan tarif pungutan ekspor dan bea keluar CPO dan turunannya.

Kelima, melakukan penertiban perizinan usaha perkebunan, rekonsiliasi data luasan dan produksi CPO dan produksi turunannya untuk memperoleh data yang valid sebagai basis perhitungan bagi hasil ke daerah serta untuk optimalisasi penerimaan PBB P3.

Keenam, mengusulkan penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk perbaikan infrastruktur dan lingkungan.***



Inflasi Kalteng 2019 Stabil.

Palangka Raya – Biro PKP. Provinsi Kalimantan Tengah pada Desember 2019 mengalami inflasi 0,66 %, meningkat dibanding November sebesar 0,39 %. Namun secara tahunan, inflasi Kalteng 2019 mencapai 2,45 %, lebih rendah dibanding inflasi 2018 sebesar 4,52 %.

Demikian disampaikan Deputy Kepala Perwakilan BI Kalteng Devy Ika Puspitasari dalam Rilis kepada sejumlah wartawan awal Januari 2020. Devy menjelaskan, Kota Sampit dan Palangka Raya mengalami inflasi bulanan secara spasial masing-masing sebesar 0,63 % dan 0,26 % (mtm).

Kedua Kota tersebut mengalami inflasi lebih tinggi dibanding November 2019 yakni 0,46 % Palangka Raya dan Kota Sampit 0,26 %. Namun secara tahunan, inflasi Palangka Raya

lebih tinggi dibanding Sampit yakni 2,02 % pada November menjadi 2,70 % pada Desember 2019.

Rendahnya capaian inflasi Kalteng secara tahunan karena relatif terjaganya pasokan dan tidak adanya kenaikan harga yang diatur pemerintah. “Relatif tidak adanya gangguan pasokan bahan makanan. Khususnya komoditas daging ayam ras, cabe merah dan bawang merah di akhir tahun sehingga menjadi peredam tekanan inflasi Kalteng tahun 2019”, kata Devy.

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya capaian inflasi Kalteng 2019 adalah tidak adanya peningkatan harga komoditas yang diatur pemerintah khususnya tarif angkutan udara seperti yang terjadi tahun 2018.

Dijelaskan, Januari 2020

diprakirakan tekanan inflasi Kalteng mengalami penurunan. Penurunan tersebut disumbang oleh inflasi pada kelompok bahan makanan karena menipisnya pasokan sejumlah komoditas di tengah permintaan yang masih cenderung tinggi pada awal tahun.

Menurut Devy, kelompok harga yang diatur pemerintah diprediksi mengalami deflasi karena normalisasi tarif angkutan udara pasca Natal dan Tahun Baru serta penurunan harga BBM. “Harga beberapa komoditas strategis terpantau cukup stabil dengan kenaikan yang belum signifikan, namun kenaikannya dapat menjadi sinyal untuk kita terus pantau ke depannya” terang Devy.

Diingakan, komoditas yang mengalami kenaikan yang perlu menjadi perhatian di Palangka Raya adalah cabe merah dan di Sampit cabe merah dan bawang putih.***



Gubernur Tanam Padi Varietas Unggul Di Lembeng Barsel

LEMBENG – Barito Selatan. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran pada minggu ketiga bulan Februari 2020 melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Kabupaten di DAS Barito antara lain Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur dan Kabupaten Murung Raya.

Sugianto Sabran didampingi Bupati Barito Selatan Edy Raya Samsuri dan sejumlah Pimpinan OPD Provinsi dan Kabupaten Barito Selatan melakukan penanaman padi varietas Inpari-30 secara simbolis di Desa Lembeng Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan dan dilanjutkan dengan peresmian Rice Milling Unit (RMU), Kamis (23/01/2020).

Sugianto Sabran juga meninjau pembangunan jembatan dan penyelesaian jalan provinsi di wilayah Barito Selatan yang diharapkan kondisinya sudah bagus pada akhir 2020. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menggunakan dana APBD Provinsi tersebut untuk mendukung pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Kapuas, Pulpis, Barsel dan Bartim dalam rangka menyambut Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur. “Kita menyambut IKN. Saya berharap DAS Barito jadi daerah penyangga pangan. Yang penting Pak Bupati punya keinginan mem-backup pangan untuk

daya tahan pangan warga dan keluarga,” ujarnya.

Bupati Barsel Edy Raya Samsuri menyampaikan terima kasihnya karena Kabupaten Barito Selatan menjadi salah satu daerah penerima bantuan RMU dari 3 kabupaten lainnya di Kalteng. “Terima kasih banyak atas kepercayaan yang diberikan kepada Barsel,” ucapnya seraya mengharapkan pihak Pemprov Kalteng bisa memberikan bantuan peralatan.

Di Desa Lembeng tersebut Sugianto Sabran bersilaturahmi dengan warga setempat yang menerima pengobatan dan sunatan gratis yang diakhiri dengan kunjungan ke Ponpes Manaarul Huda di Simpang Pendang.

Dari Simpang Pendang, Sugianto Sabran beserta Bupati Edy Raya Samsuri dan rombongan menyambangi SMAN 1 Dusun Selatan dan berdialog dengan siswa setempat. Sugianto Sabran menegaskan dirinya fokus pada pembangunan infrastruktur, Kesehatan dan SDM. “Ketika infrastruktur bagus, nanti orang berbondong-bondong ke Kalteng. Kalau SDM-nya tidak siap, maka yang menikmati hasilnya bisa orang dari luar Kalteng,” jelasnya seraya berpesan kepada orang tua agar menjaga anaknya dari bahaya Narkoba dan menghindari pergaulan bebas.

Sugianto Sabran juga bersilaturahmi dan berdialog dengan Pimpinan OPD Kabupaten Barito Selatan, para Camat, Lurah, Kepala Desa, Ketua



Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tomas, Toga, Todat, dan Toda, serta Pelaku UKM dan IKM se-Kabupaten Barito Selatan di Gedung Pertemuan Jaro Pirarahan Buntok dalam rangka menyerap aspirasi dan masukan untuk meningkatkan pembangunan di Bumi Tambun Bungai.

Sugianto Sabran menegaskan Visi/Misi Gubernur, Bupati dan Walikota dalam waktu 5 tahun adalah Perbaikan dan Pembangunan Infrastruktur khususnya jalan, jembatan, gorong-gorong, pelabuhan udara dan pelabuhan sungai. Selain itu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung akselerasi pembangunan daerah. "Jadi Perlu kerja keras untuk membangun Kalteng," katanya.

Di sektor pendidikan juga dijelaskan tercatat 5000 mahasiswa S1 yang mendapat beasiswa Bidik Misi dari Pemprov Kalteng. Demikian juga di bidang kesehatan tidak ada masyarakat yang ditolak pelayanan kesehatannya di rumah sakit provinsi. "Kami siapkan dana, karena itu tugas pimpinan wajib melayani masyarakat miskin. Kami yang mengobati, kami yang membiayai, jangan takut," jelasnya.

Mengakhiri kunjungannya kerjanya di Barito Selatan, Sugianto Sabran meresmikan dua buah jembatan yakni Jembatan Sei Ayuh dan Jembatan Bahalang Bangkuang yang dipusatkan di Desa Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Jumat (24/01/2020).



WAGUB : Pembangunan Infrastruktur Buka Keterisolasian Daerah

Sementara itu Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya juga melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Barito Selatan dalam rangka mensosialisasikan pembangunan yang sudah dilakukan Gubernur Kalteng khususnya di bidang infrastruktur jalan dan jembatan. "Itu untuk kesejahteraan masyarakat, konektivitas, integrasi seluruh infrastruktur di Kalimantan Tengah untuk membuka keterisolasian daerah di Kalimantan Tengah sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat semakin," papar Wagub.

Diungkapkan, lebih dari 20 tahun jembatan Sei Ayuh itu menggunakan konstruksi kayu ulin dengan kondisi rusak. Perbaikan Jembatan Sei Ayuh ini mempersingkat jarak tempuh antara Barsel - Barut dari 101 km menjadi 61 km sehingga mempersingkat waktu tempuh sekitar 45 menit karena sebelumnya harus melalui Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur.

Perbaikan jembatan tersebut menggunakan dana APBD Kalteng Rp 19 miliar lebih untuk mengganti konstruksi Jembatan Sei Ayuh yang semula menggunakan konstruksi ulin menjadi rangka baja sekaligus perkuatan tebing sungai dengan sheet pile. Sedangkan untuk Jembatan Bahalang Bangkuang, Pemprov menyediakan dana Rp 9,5 miliar lebih untuk mengganti konstruksi jembatan dengan konstruksi pile slab. Kedua jembatan ini memiliki bentang panjang masing-masing 60 meter dengan lebar 7 meter untuk Jembatan Sei Ayuh dan 9 meter untuk Jembatan Bahalang Bangkuang.***

Gubernur Pimpin Hari Bhakti Imigrasi Ke-70 Tingkat Provinsi Kalteng 2020

Palangka Raya – Biro PKP. Peringatan Hari Bhakti Imigrasi Ke-70 tingkat provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dilaksanakan di halaman Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Senin (27/01/2020) dengan Inspektur Upacara Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran.

Gubernur H. Sugianto Sabran atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan selamat Hari Bhakti Imigrasi Ke-70 dan berharap Kantor Imigrasi akan semakin maju dengan memperkuat Sumber Daya Manusia yang unggul. “Saya atas nama masyarakat Kalimantan Tengah mengucapkan selamat Hari Bhakti Imigrasi Ke-70. Semoga dengan Sumber Daya Manusia yang unggul, jajaran Imigrasi akan makin maju”, ujarnya.

Gubernur Sugianto Sabran pada kesempatan itu menyampaikan sambutan tertulis Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang meminta kepada Direktorat Jenderal Imigrasi beserta seluruh jajaran pada tahun 2020 untuk meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian.

Menkum dan HAM meminta pihak Imigrasi agar terus berupaya melakukan pengembangan Sistem Layanan Izin Tinggal Terbatas melalui penyediaan persetujuan izin tinggal terbatas secara elektronik; pengembangan penegakan hukum melalui perwujudan administrasi penegakan hukum dan penurunan jumlah pelanggaran keimigrasian; peningkatan kualitas Produk Intelijen Keimigrasian; peningkatan Pelayanan Pengamanan Dokumen Perjalanan melalui penggunaan paspor elektronik berbahan polikarbonat; dan meningkatkan kerja sama kemigrasian antar lembaga. “Target kinerja tersebut memang tidaklah mudah. Imigrasi membutuhkan SDM yang unggul untuk dapat merealisasikan target kinerja yang telah diamanatkan”, tegas Yasona.

Pihak Imigrasi juga diminta merealisasikan target kinerja secara terukur. “Saya menaruh



harapan, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat merealisasikan seluruh target kinerja dengan baik dan tetap dalam koridor pelaksanaan yang terukur. Masyarakat menunggu gagasan-gagasan baru Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi,” imbuhnya.

Upacara tersebut dirangkai pula dengan penyerahan Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI yang diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Sugianto kepada Bupati Kotawaringin Barat Norhidayah. Penghargaan itu diberikan atas dorongan dan bantuan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat membangun Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit di Pangkalan Bun dan penyerahan Piagam Penghargaan Purna Pengayoman dari Kanwil Kemenkumham Kalteng kepada Ahmadi, salah satu PNS yang purna tugas.

Upacara tersebut diikuti sekitar 250 peserta dari jajaran Kemenkumham Kalteng yang dihadiri Kajati Kalteng Mukri, Danrem 102/PJG Kol. Arm. Saiful Rizal, Wakil Ketua PTA Kalteng Luthfi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Palangka Raya Arief Rachman Kunjono, Kakanwil kemenag Masrawan, dan sejumlah Kepala SKPD Provinsi.***



Wagub Kalteng : Perbedaan Bukan Untuk Diperdebatkan

PURUK CAHU – Biro PKP. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya menegaskan perbedaan bukan untuk diperdebatkan. “Kita diciptakan berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling tolong-menolong, bahu-membahu, saling mengisi perbedaan. Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, perbedaan untuk mempercantik keadaan. Kenapa pelangi indah? Karena warnanya berbeda-beda,” papar Wagub dalam Tabligh Akbar Murung Raya Bersholawat di Masjid Agung Al-Istiqlal Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, Sabtu malam (25/1/2020).

Tabligh Akbar bertema “Dengan Sholawat Memperkokoh Ukhuwah Islamiyah Menuju Murung Raya Berkah” itu dihadiri Bupati Murung Raya Perdie N.Yoseph dan Wakil Bupati Murung Raya Rejikinooor.

Wagub mengimbau sesama muslim agar memepererat ukhuwah Islamiyah, menjaga persatuan bangsa dan tidak mudah dipecah-belah dengan kabar bohong atau hoaks. “NKRI harga mati,” tegas Habib Ismail.

Sementara itu, Bupati Murung Raya Perdie N. Yoseph mengimbau masyarakat untuk menjaga situasi kondusif yang sudah tercipta di Bumi Tira Rangka Balang pada saat gelaran Pilkada nanti.

Demikian juga para remaja diiharapkan tidak melakukan pernikahan dini yang juga dapat memicu perceraian dini. Usia ideal menikah minimal 21 tahun. Untuk itu para orang tua diimbauterus berupaya membentuk karakter anak-anaknya agar memiliki prinsip “sekolah dulu, baru menikah”. “Usaha pemerintah untuk menurunkan kemiskinan 4,5 persen di Murung Raya agak sulit karena masalah sosial,” jelasnya.

Wagub Kalteng Gali Potensi Wisata Kalteng Bersama Komunitas Motor Trail

SIMPANG POSING

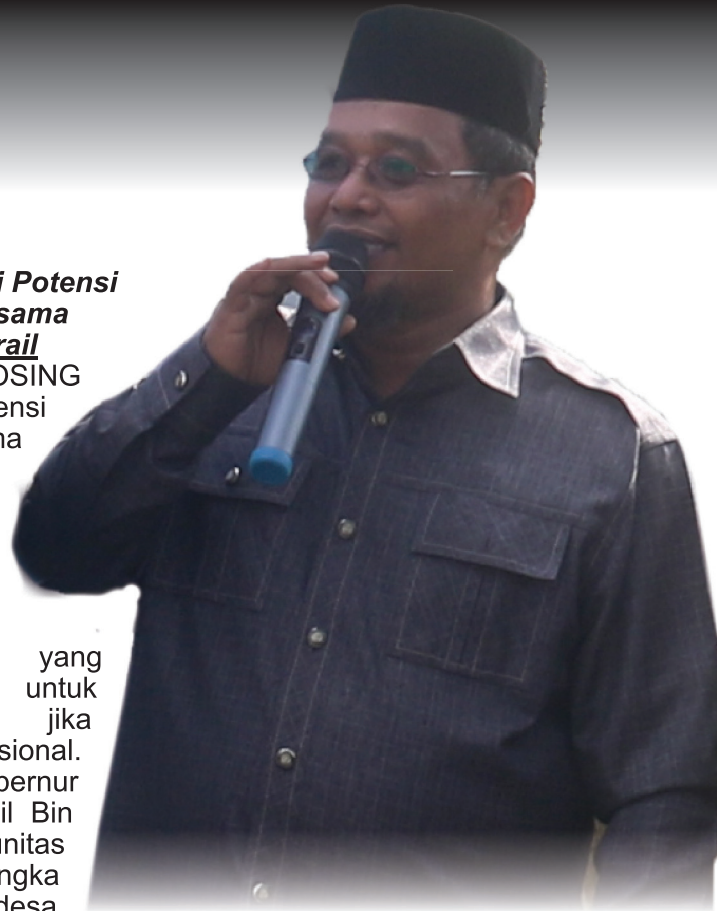
– MURA. Potensi pariwisata terutama

Pemandangan alam yang indah di Kalimantan Tengah termasuk di wilayah Kabupaten Murung Raya merupakan potensi pariwisata yang cukup menjanjikan untuk menambah PAD jika dikelola secara profesional.

Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya beserta komunitas Motor Trail Palangka Raya melintasi desa-desa terpencil di Murung Raya sembarai menikmati keindahan alam sekaligus mendata dan menggali potensi pariwisata lokal, Minggu (26/01/2020).

Bahkan, perjalanan semakin menantang ketika Komunitas Motor Trail Palangka Raya melintasi sungai yang berbatu-batu sepanjang kurang lebih 4 kilometer di Desa Muara Babuat. “Disamping ingin melihat desa-desa terpencil yang tidak bisa dijangkau dengan mobil, juga ingin melihat potensi pariwisata lokal untuk bisa dikelola oleh desa-desa terdekat,” kata Wagub saat tiba di Simpang Posing sembari menjelaskan bahwa pariwisata lokal dapat dikelola oleh BUMDes untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. “Semua yang kita lakukan ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Gubernur Kalimantan Tengah pada Februari 2020 dijadwalkan akan ikut bergabung dengan Komunitas Motor Trail Palangka Raya dan diwajibkan meninjau langsung desa-desa terpencil di Kalimantan Tengah.



Kegiatan Komunitas Motor Trail Palangka Raya ini memang sudah cukup lama dan rutin dilakukan, minimal dua kali dalam sebulan menjelajahi desa-desa terpencil di kalteng sekaligus melakukan bakti sosial.

Bakti sosial dilaksanakan tanggal 1 dan 2 Februari Desa Muara Awang Kabupaten Barito Timur dan sekitarnya bersama masyarakat setempat. Komunitas Motor Trail Palangka Raya juga melakukan camping dan bakti sosial menyiapkan tong air, pemasangan karpet untuk rumah ibadah dan balai basarah serta bergotong-royong membersihkan obyek-obyek wisata.

Sebelumnya, Komunitas Motor Trail Palangka Raya menggelar bakti sosial di desa Tumbang Sanamang selama tiga hari serta memasang amplifier dan microphone yang diperlukan di masjid Tumbang Mahub Katingan. Sampai saat ini beberapa desa di Kabupaten Katingan masih belum terjangkau aliran listrik PLN.***

Gubernur Minta Pramuka Dihidupkan Untuk Pembangunan Karakter



TAMIANG LAYANG – Biro PKP. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran meminta seluruh pihak terkait agar menghidupkan dan membumikan kembali kegiatan kepramukaan di lingkungan sekolah dan di luar sekolah. “Saya mengajak seluruh guru dan pejabat terkait untuk membumikan gerakan Pramuka karena Pramuka membangun karakter, termasuk bela negara,” jelas Sugianto ketika berdialog dengan siswa-siswi SMA, SMK dan MA di SMAN 1 Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur, Jumat (24/01/2020).

Sugianto juga meminta kalangan pelajar agar menjauhi narkoba dan pergaulan bebas, tidak malas dan berani menyampaikan pendapatnya. Sugianto kembali menegaskan komitmen pemerintah provinsi yang tetap fokus dalam membangun sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur termasuk di Kabupaten Barito Timur. “Saya ingin Barito Timur yang dekat dengan calon Ibu Kota baru diperkuat sehingga tidak menjadi penonton saat Ibu Kota Negara dipindahkan. Jadi penting untuk dijadikan kawasan ekonomi khusus,” bebernya.

Seusai dialog dengan pelajar setempat, Sugianto Sabran meninjau Embung Sirau di Desa Haringin Kecamatan Dusun Timur. Dikatakan, kerusakan embung menimbulkan masalah dalam penyediaan air bersih atau air baku untuk Tamiang Layang khususnya atau Barito Timur pada umumnya. Apabila ada kerusakan seperti rembesan di bawah embung dapat diperbaiki maka penyediaan air baku bagi masyarakat akan lebih baik lagi. “Ini sangat membantu masyarakat yang memerlukan air bersih,” jelasnya.

Dalam kunjungannya ke Barito Timur, Sugianto

Sabran yang didampingi Anggota DPR RI Agustiar Sabran, Bupati Barito Timur, Wakil Bupati Bartim, Kadis PUPR dan Kadis Perkimtan Provinsi Kalteng juga meninjau perbaikan ruas jalan Hayaping-Patung di Desa Hayaping Kecamatan Patangkep Tutui, Sabtu (25/1/2020).

“Kami coba melihat, kami kontrol jalan yang kami lewati musim kemarau, musim penghujan itu sudah selesai atau tidak. Alhamdulillah ini sudah selesai, berarti konektivitas antara warga dan arus barang semuanya lancar. Ini semua atas koordinasi Bupati dan Gubernur Kalimantan Tengah,” ungkapnya.

Ruas jalan Hayaping-Bentot, Hayaping-Hayaping dan Hayaping-Patung sepanjang 40 km ditargetkan selesai diaspal seluruhnya pada tahun 2020. Saat ini panjang jalan yang belum diaspal hanya 8 kilometer .

Sementara di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur, Sugianto bertemu dengan masyarakat yang berdomisili di sekitar ruas jalan eks Pertamina di balai desa setempat. Sugianto berharap jalan eks Pertamina menjadi jalan umum atau jalan khusus tanpa memungut biaya dari masyarakat. “Harapan saya ke sini, jalan eks Pertamina akan jadi jalan umum, tidak ada lagi calo-calo, kita perbaiki, kita lagi atur regulasi dan undang-undangnya,” katanya.

Jalan eks Pertamina ini akan diaspal apabila menjadi jalan umum atau jalan provinsi, apabila dialihkan fungsinya untuk jalan khusus maka masyarakat tetap bisa melewatinya tanpa dipungut biaya. “Tapi pengusaha tetap dipungut biaya,” imbuhnya.

la menegaskan akan menyelesaikan sengketa antar perusahaan dan antara perusahaan dengan masyarakat. Untuk itu masyarakat diminta menjaga ketertiban dan keamanan agar para investor datang dan ekonomi masyarakat terbantu, termasuk dapat menikmati listrik 24 jam.

Demikian juga pembangunan infrastruktur pendidikan dipastikan dibangun sekolah unggulan di Barito Timur tahun depan. "2021, saya pastikan sekolah unggulan kita bangun di Barito Timur. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi agar memperhatikan pembangunan sekolah unggulan itu sesuai dengan spesifikasinya. Jangan tanggung-tanggung agar mereka benar-benar jadi manusia hebat," ucap Gubernur dalam pertemuan dengan para Camat, Lurah, Kepala Desa, Ketua BPD, Tomas, Toda, dan Todat, serta Pelaku Usaha UKM dan IKM se-Kabupaten Bartim di Rujab Bupati Barito Timur, Jumat malam (24/1/2020).

Gubernur : Kalteng Harus Jadi Penghasil Beras, Mandiri dan Bermartabat

RODOK – Barito Timur. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam kunjungan hari kedua di Barito Timur meresmikan Rice Milling Unit (RMU) di Desa Rodok Kecamatan Dusun Tengah, Sabtu (25/1/2020).

Disebutkan, saat ini sudah empat kabupaten yang mendapatkan bantuan mesin penggilingan padi modern seharga sekitar Rp 2 miliar per-unit termasuk 1 unit di Kabupaten Barito Timur."Kami coba, maksimal atau tidak maksimal hasil-hasil

pertanian kita nanti. Kalau memang maksimal, nanti tahun 2021 kami akan menganggarkan kembali di APBD Kalimantan Tengah untuk membeli seperti ini lagi," jelas Sugianto Sabran.

Kalteng diharapkan dapat menjadi penghasil beras sehingga tidak bergantung dengan daerah lain dan bermartabat karena provinsi ini memiliki areal pertanian seluas 283 ribu hektare dan menghasilkan gabah kering sekitar 800 ribu ton/tahun. Kalteng saat ini mengalami surplus beras sekitar 140 ribu ton/tahun dan Bartim menyumbang kurang lebih 2400 ton/tahun dan Bartim juga sudah memproduksi beras Gumi Nansarunai.

Peresmian RMU di Rodok itu dirangkai dengan penyerahan sertifikat padi organik nasional melalui internal control system yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Organik Seloliman, Mojokerto. Sertifikat diserahkan Gubernur kepada Bupati Bartim yang selanjutnya diserahkan kepada Kelompok Tani Pancar Karya dari Desa Ampah Kecamatan Dusun Tengah dan penyerahan bantuan untuk program tanaman pangan Provinsi Kalteng berupa dua unit alat tanam jagung kepada Bansunir selaku Ketua Poktan Sama Taka Paku dan Mardani selaku Ketua Poktan Suka Maju dari Kecamatan Paku.

Dari Desa Rodok, Gubernur dan rombongan didampingi Bupati Barto Timur Ampera A.Y Mebas menuju Desa Tumpang Ulung Kecamatan Pematang Karau untuk melakukan penanaman padi varietas Inpari-30 secara simbolis menggunakan alat tanam padi rice planter.***





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
mengucapkan

SELAMAT TAHUN BARU 2020



H. SUGIANTO SABRAN
Gubernur Kalimantan Tengah

HABIB ISMAIL BIN YAHYA
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah

***KALTENG Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan segenap
Masyarakat Menuju KALTENG BERKAH.***

(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)



<http://www.birokpk.kalteng.go.id>



<http://www.facebook.com/SetdaProvKalteng/>



http://www.twitter.com/setda_kalteng



[@sekretariat.daerah.kalteng](https://www.instagram.com/@sekretariat.daerah.kalteng)



buletin.isenmulang@gmail.com